

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

7. 1. KEBIJAKAN UMUM

Pada bab terdahulu visi dan misi pembangunan daerah Kota Malang telah diuraikan dalam strategi dan arah kebijakan yang lebih jelas dan detail. Berikutnya perlu untuk ditindaklanjuti dengan penjabaran arah kebijakan yang ada pada berbagai indikator kinerja, target kinerja dan sebaran tanggung jawab pada berbagai sektor yang ada di lingkup pemerintahan Kota Malang. Pada bab ini perlu dilakukan perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Melalui perumusan kebijakan umum, diperoleh cerita strategi melalui program-program yang saling terkait dan rasional dalam mendukung pencapaian indikator dan target sasaran yang ditetapkan. Keberhasilan capaian satu program mendukung atau memicu keberhasilan program lainnya.

Sedangkan kriteria suatu rumusan kebijakan umum antara lain:

1. Menjelaskan strategi lebih spesifik, konkrit, operasional dan fokus;
2. Mengarahkan pemilihan program yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran; dan
3. Mengarahkan pemilihan program agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum.

Melalui rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan atau diperolehnya berbagai program yang paling efektif mencapai sasaran. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan umum agar dapat merangkai program-program prioritas yang *inherent*. Agar kebijakan umum dapat dijadikan pedoman dalam menentukan program prioritas yang tepat, kebijakan umum dibuat dalam empat perspektif sesuai strateginya, sebagai berikut:

1. Kebijakan pada perspektif masyarakat/layanan adalah kebijakan yang dapat mengarahkan kejelasan segmentasi masyarakat yang akan dilayani, kebutuhan dan aspirasi mereka dan layanan apa yang harus diberikan;

2. Kebijakan pada perspektif proses internal adalah kebijakan bagi operasionalisasi birokrat dan lembaga pemerintahan yang mendorong proses penciptaan nilai dari proses inovasi, pengembangan barang/jasa publik, dan penyerahan layanan pada segmentasi masyarakat yang sesuai;
3. Kebijakan pada perspektif kelembagaan yaitu kebijakan yang mendorong upaya-upaya yang mengungkit kinerja masa depan berupa investasi pada perbaikan SDM, sistem, dan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan kinerja operasional pemerintahan daerah;
4. Kebijakan pada perspektif keuangan yaitu kebijakan yang memberi jalan bagi upaya untuk mengefektifkan alokasi anggaran, efisiensi belanja, dan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah demi mendukung strategi pembangunan daerah.

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pendanaan pembangunan, dilakukan langkah-langkah, yang meliputi :

- Memperkuat dan memperluas kemitraan dengan berbagai pihak yang saling menguntungkan.
- Optimalisasi pemanfaatan *Corporate social responsibility* (CSR) dari BUMN/BUMD dan Perusahaan (Perseroan Terbatas/PT). Optimalisasi akan dilakukan dengan

membentuk wadah yang merupakan tempat bagi para perusahaan untuk menyalurkan dana CSR berdasarkan Pergub Jatim No 52 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Jatim no 4 tahun 2010 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Sementara ini dana CSR perusahaan yang ada oleh Pemkot Malang digunakan untuk pendanaan pada kegiatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam bentuk membangun taman Kota serta digunakan untuk menyediakan rumah layak huni dalam bentuk kegiatan bedah rumah warga miskin. Untuk itu, kedepan keberadaan wadah yang merupakan tempat penyaluran dana SCR akan dimanfaatkan sebagai sarana untuk menginformasikan rencana pembangunan Kota serta dana CSR yang dimiliki perusahaan guna terciptanya integrasi program SCR perusahaan dengan pembangunan daerah.

- Kerjasama antar daerah. Maju mundurnya satu daerah juga bergantung pada daerah-daerah lain, khususnya daerah yang berdekatan. Melalui kerjasama antar daerah diharapkan menjadi salah satu jembatan untuk mengoptimalkan potensi pembangunan yang saling menguntungkan. Kerjasama antar pemerintah daerah merupakan suatu kebutuhan bagi sebuah proses pembangunan. Mengingat begitu banyaknya masalah dan

kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi dan diatasi dengan melewati batas-batas wilayah administratif. Misalnya (a) Masalah kemacetan yang terjadi di Kota Malang utamanya setiap akhir pekan. Kondisi tersebut sedikit banyak juga terpengaruhi oleh mobilitas masyarakat dari luar Kota Malang yang masuk untuk melakukan aktivitas, baik aktivitas wisata, pendidikan maupun bisnis. (b) Pariwisata. Kota Malang yang merupakan wilayah tengah atas kota wisata lain seperti di Kabupaten Malang dan Kota Batu perlu mengintegrasikan pembangunan yang dilakukan guna mengoptimalkan pembangunan pariwisata yang dilakukan. (c) Pendidikan. Berdasarkan data tingkat SD dan SMA/SMK dengan jumlah penduduk yang tidak berbanding lurus. Contohnya berdasarkan APK SD Kota Malang sebesar 86.864 sedangkan usia 7-12 tahun mencapai 80.520. artinya terdapat lebih dari 6.344 siswa SD yang sekolah di Kota Malang bisa berasal dari luar daerah Kota Malang. Dan APK SMA/SMK di Kota Malang mencapai 51.563 berbanding dengan penduduk usia 16-18 tahun sebesar 37.954. artinya terdapat 13.609 siswa yang sekolah di Kota Malang berasal dari luar daerah Kota Malang. Kondisi tersebut tentunya memerlukan kerjasama antar daerah yang ada guna mengurangi beban daerah Kota Malang sebagai

tempat pendidikan bagi penduduk yang bukan dari Kota Malang.

- Pendanaan pembangunan daerah dengan pola *cost sharing* dengan pemerintah dan pemerintah provinsi.

Kebijakan Umum Pembangunan Kota Malang 2013 – 2018 disusun sebagai tahap operasional dari upaya untuk mencapai Visi dan Misi Kota Malang selama lima tahun ke depan. Berikut ini akan dijabarkan kebijakan umum dari tiap-tiap Misi pembangunan Kota Malang 2013 – 2018.

1. Misi I : *Menciptakan Masyarakat yang Makmur, Berbudaya dan Terdidik Berdasarkan Nilai-Nilai Spiritual yang Agamis, Toleran dan Setara.*

Untuk memperjelas pelaksanaan misi ini, dirumuskan 3 tujuan pokok yang ingin dicapai, yakni:

- 1). Terwujudnya peningkatan kualitas kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

Guna mewujudkan tujuan misi ini, ditentukan Kebijakan Umum berupa:

- a. Pembinaan PMKS;
- b. Peningkatan fasilitas penanganan PMKS;
- c. Peningkatan kerjasama guna pembinaan PMKS
- d. Optimalisasi bantuan program bagi warga miskin;

- e. Peningkatan pelatihan ketrampilan untuk pemberdayaan masyarakat miskin;
 - f. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan.
- 2). Terwujudnya dan tumbuhnya kehidupan beragama yang berkualitas dan toleran.
- Guna mewujudkan tujuan misi ini, ditentukan Kebijakan Umum berupa:
- a. Fasilitasi kebutuhan masyarakat di bidang keagamaan.
- 3). Terwujudnya kehidupan sosial masyarakat yang tertib dan berkesadaran hukum.
- Guna mewujudkan tujuan misi ini, ditentukan Kebijakan Umum berupa:
- a. Peningkatan pendidikan politik kewarganegaraan;
 - b. Peningkatan sarana dan prasarana keamanan lingkungan;
 - c. Koordinasi dan kerjasama keamanan lingkungan dengan aparat terkait;
 - d. Peningkatan kesiagaan terhadap bencana;
 - e. Peningkatan peran keluarga sebagai kelompok sosial terkecil.
- 4). Terwujudnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak

Guna mewujudkan tujuan misi ini, ditentukan Kebijakan Umum berupa:

- a. Peningkatan perlindungan perempuan dan anak;

2. Misi II : *Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Adil, Terukur dan Akuntabel.*

Untuk memperjelas pelaksanaan misi ini, dirumuskan 3 tujuan pokok yang ingin dicapai, yakni:

1). Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik Prima

Guna mewujudkan tujuan misi ini, ditentukan Kebijakan Umum berupa:

- a. Efektivitas dan efisiensi pengolahan data dalam sistem manajemen informasi yang berkaitan dengan pelayanan publik
- b. Perluasan akses publik terhadap informasi publik
- c. Pengembangan sistem dan informasi data base daerah
- d. Peningkatan fasilitas pelayanan publik
- e. Optimalisasi saluran pengaduan layanan publik melalui berbagai media disertai dengan penanganan yang cepat dan tepat
- f. Peningkatan layanan administrasi Kependudukan
- g. Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah

- h. Optimalisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
 - i. Pengembangan sistem rekrutmen jabatan yang bersih dari KKN
 - j. Pengembangan sistem pelatihan guna peningkatan kapasitas pengetahuan, nilai, dan ketrampilan aparatur
 - k. Optimalisasi pelaksanaan tunjangan pegawai yang berasaskan keadilan
- 2). Terwujudnya Peningkatan kualitas peraturan daerah
Guna mewujudkan tujuan misi ini, ditentukan Kebijakan Umum berupa:
- a. Peningkatan kapasitas anggota DPRD
 - b. Penataan dan Penegakan Peraturan Daerah
- 3). Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan daerah
Guna mewujudkan tujuan misi ini, ditentukan Kebijakan Umum berupa:
- a. Peningkatan kuantitas dan kualitas kegiatan penelitian, pengembangan, dan statistik dalam perencanaan daerah
 - b. Peningkatan kualitas musrenbang sebagai media serap aspirasi pembangunan daerah

3. Misi III : Mengembangkan potensi daerah dengan wawasan lingkungan yang berkesinambungan, adil dan ekonomis.

Untuk memperjelas pelaksanaan misi ini, dirumuskan tujuan pokok yang ingin dicapai, yakni:

Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup

Guna mewujudkan tujuan misi ini, ditentukan Kebijakan Umum berupa:

- a. Pembuatan kebijakan daerah untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
- b. Peningkatan Pemantauan dan pengawasan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
- c. Peningkatan penghijauan kota (Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH))
- d. Pengelolaan persampahan
- e. Peningkatan fasilitas sarana prasarana pertamanan dan dekorasi kota
- f. Pengelolaan PJU, PJJ dan dekorasi kota
- g. Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang dan meningkatkan kesesuaian pemanfaatan lahan dengan rencana tata ruang
- h. Pengoptimalan pengawasan penyelenggaraan penataan ruang termasuk didalamnya melalui pengendalian pemanfaatan ruang
- i. Inventarisasi lahan aset daerah

- j. Pengendalian pemanfaatan lahan aset daerah
- k. Optimalisasi pemanfaatan lahan penunjang pembangunan daerah

4. Misi IV : *Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat Kota Malang sehingga Bisa Bersaing di Era Global.*

Untuk memperjelas pelaksanaan misi ini, dirumuskan 3 tujuan pokok yang ingin dicapai, yakni:

- 1). Terwujudnya kualitas dan relevansi pendidikan yang dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat.

Guna mewujudkan tujuan misi ini, ditentukan Kebijakan Umum berupa:

- a. Peningkatan mutu manajemen pendidikan
 - b. Peningkatan profesionalisme guru dan tenaga Kependidikan
 - c. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
 - d. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini
 - e. Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan non-formal
 - f. Peningkatan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus
- 2). Terwujudnya peningkatan peran pemuda dalam pembangunan daerah

Guna mewujudkan tujuan misi ini, ditentukan Kebijakan Umum berupa:

- a. Peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda
- b. Fasilitasi kesempatan berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi
- c. Peningkatan penyelenggaraan event-event olahraga bagi pemuda
- d. Pembinaan terhadap cabang-cabang olahraga daerah

5. Misi V : *Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat Kota Malang baik Fisik, maupun Mental untuk Menjadi Masyarakat yang Produktif.*

Untuk memperjelas pelaksanaan misi ini, dirumuskan tujuan pokok yang ingin dicapai, yakni:

Terwujudnya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat

Guna mewujudkan tujuan misi ini, ditentukan Kebijakan Umum berupa:

- a. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana/ prasarana kesehatan
- b. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan
- c. Peningkatan keselamatan dan kesehatan ibu melahirkan, bayi, dan balita

- d. Peningkatan status gizi masyarakat
- e. Pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular
- f. Peningkatan promosi kesehatan
- g. Peningkatan peran serta masyarakat dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
- h. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat miskin
- i. Pengembangan jaminan sosial pembiayaan kesehatan
- j. Pembinaan Kesehatan Keluarga melalui Program Keluarga Berencana

6. Misi VI : *Membangun Kota Malang sebagai Kota Tujuan Wisata yang Aman, Nyaman, dan Berbudaya.*

Untuk memperjelas pelaksanaan misi ini, dirumuskan tujuan pokok yang ingin dicapai, yakni:

Terwujudnya pengembangan pariwisata berbasis kebudayaan, lingkungan, dan kreativitas masyarakat

Guna mewujudkan tujuan misi ini, ditentukan Kebijakan Umum berupa:

- a. Inventarisasi aset budaya tradisional Kota Malang, terutama yang dapat dikembangkan sebagai potensi wisata
- b. Inventarisasi dan pembinaan kelompok-kelompok budaya di Kota Malang

- c. Peningkatan dukungan dan apresiasi terhadap aktivitas kebudayaan oleh budayawan/seniman dan masyarakat
- d. Fasilitasi dan intensifikasi promosi wisata berbasis seni budaya
- e. Pengembangan Destinasi Pariwisata

7. Misi VII : *Mendorong Pelaku Ekonomi Sektor Informal dan UKM agar Lebih Produktif dan Kompetitif.*

Untuk memperjelas pelaksanaan misi ini, dirumuskan 2 tujuan pokok yang ingin dicapai, yakni:

- 1). Terwujudnya Produktivitas dan Daya Saing Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Guna mewujudkan tujuan misi ini, ditentukan Kebijakan Umum berupa:

- a. Pembuatan kebijakan daerah yang mendorong tumbuh kembangnya UKM
- b. Pembinaan kapasitas kelembagaan UKM
- c. Pembinaan manajemen keuangan UKM
- d. Inventarisasi jumlah dan sebaran PKL serta Peningkatan bantuan kredit permodalan melalui fasilitasi hubungan dengan kalangan perbankan
- e. Pembangunan sentra-sentra PKL yang layak, yang terintegrasi dengan kawasan pengembangan kota

- f. Pengembangan kerjasama dengan berbagai pihak untuk memberdayakan pedagang pasar tradisional
 - g. Penataan pasar tradisional kecamatan
 - h. Pembinaan pengelolaan dan keuangan koperasi
- 2). Terwujudnya peningkatan pengelolaan potensi pangan daerah
- a. Guna mewujudkan tujuan misi ini, ditentukan Kebijakan Umum berupa:
 - b. Peningkatan produksi potensi unggulan daerah di bidang pertanian/ perkebunan, peternakan, dan perindustrian
 - c. Peningkatan ketersediaan dan cadangan pangan daerah
 - d. Peningkatan penganekaragaman produksi pangan
 - e. Peningkatan distribusi bahan pangan

8. Misi VIII : *Mendorong Produktivitas Industri dan Ekonomi Skala Besar yang Berdaya Saing, Etis dan Berwawasan Lingkungan.*

Untuk memperjelas pelaksanaan misi ini, dirumuskan 3 tujuan pokok yang ingin dicapai, yakni:

- 1). Terwujudnya Pertumbuhan industri-industri baru guna peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah

Guna mewujudkan tujuan misi ini, ditentukan Kebijakan Umum berupa:

- a. Peningkatan kebijakan daerah yang mendukung investasi
 - b. Peningkatan kualitas tenaga kerja
 - c. Peningkatan kesejahteraan tenaga kerja
 - d. Peningkatan fasilitasi konflik hubungan industrial
- 2). Terwujudnya kawasan industri terintegrasi yang memperhitungkan daya dukung lingkungan

Guna mewujudkan tujuan misi ini, ditentukan Kebijakan Umum berupa:

- a. Optimalisasi alih Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam pengolahan produk unggulan
- b. Pengembangan kawasan industri kecil menengah terpadu

9. Misi IX : *Mengembangkan Sistem Transportasi Terpadu dan Infrastruktur Yang Nyaman Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat.*

Untuk memperjelas pelaksanaan misi ini, dirumuskan 2 tujuan pokok yang ingin dicapai, yakni:

- 1). Terwujudnya daya dukung transportasi

Guna mewujudkan tujuan misi ini, ditentukan Kebijakan Umum berupa:

- a. Penanganan persoalan kemacetan di berbagai ruas jalan
 - b. Peningkatan pengendalian pemanfaatan sarana transportasi dan perhubungan
 - c. Peningkatan kapasitas kelembagaan perencana dan pelaksana sistem transportasi dan memperkuat koordinasi antar sektor dan pihak terkait
- 2). Terwujudnya Pengembangan sistem transportasi perkotaan terpadu yang menjamin kelancaran mobilitas masyarakat

Guna mewujudkan tujuan misi ini, ditentukan Kebijakan Umum berupa:

Peningkatan pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan sarana bina marga

- 3). Terwujudnya ketersediaan infrastruktur perkotaan di bidang pemukiman dan drainase

Guna mewujudkan tujuan misi ini, ditentukan Kebijakan Umum berupa:

- a. Penyediaan infrastruktur dasar di wilayah miskin
- b. Peningkatan ketersediaan infrastruktur pemukiman rakyat yang layak
- c. Peningkatan ketersediaan infrastruktur drainase
- d. Pengelolaan TPU

7. 2. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam sub-bab bagian ini, akan diuraikan mengenai program pembangunan daerah Kota Malang 2013 – 2018. Penyusunan program pembangunan daerah ini mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Sedangkan dari perspektif Perencanaan Strategik, perumusan program pembangunan daerah ini merupakan penjabaran dari Strategi, Arah Kebijakan, dan Kebijakan Umum Pembangunan Kota Malang 2013 -2018.

Secara umum, terdapat dua kelompok besar dari perumusan program pembangunan Kota Malang 2013 – 2018. Yang pertama, Program Prioritas, yakni program-program yang secara langsung berkaitan dengan pencapaian Visi dan Misi pembangunan Kota Malang 2013- 2018. Program prioritas secara spesifik akan didetailkan dalam RPJMD ini, beserta dengan indikator-indikator capaiannya. Program prioritas kemudian akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam kegiatan-kegiatan oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.

Sedangkan kelompok program yang kedua adalah Program Pendukung, yakni program-program yang tidak secara detail dirumuskan dalam RPJMD ini, namun tidak kalah penting sifatnya dengan Program Prioritas. Program Pendukung akan lebih detail penjabarannya dalam Rencana Strategis

SKPD, yang disajikan bersama-sama dengan Program Prioritas. Program Pendukung disusun dengan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

Berikut ini akan diuraikan program-program pembangunan Kota Malang 2013 – 2018.

1. Misi I : *Menciptakan Masyarakat yang Makmur, Berbudaya dan Terdidik Berdasarkan Nilai-Nilai Spiritual yang Agamis, Toleran dan Setara.*

1) Tujuan :

Terwujudnya peningkatan kualitas kesejahteraan sosial bagi masyarakat

Sasaran :

Meningkatnya pemerataan kualitas kesejahteraan sosial masyarakat

Program Daerah :

- a. Pembinaan PMKS
- b. Peningkatan fasilitas penanganan PMKS
- c. Peningkatan kerjasama guna pembinaan PMKS
- d. Optimalisasi bantuan program bagi warga miskin
- e. Peningkatan pelatihan ketrampilan untuk pemberdayaan masyarakat miskin
- f. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

2) Tujuan :

Terwujudnya dan tumbuhnya kehidupan beragama yang berkualitas dan toleran

Sasaran :

Meningkatnya kualitas kehidupan sosial beragama

Program Daerah :

Fasilitasi kebutuhan masyarakat di bidang keagamaan

3) Tujuan :

Terwujudnya kehidupan sosial masyarakat yang tertib dan berkesadaran hukum

Sasaran :

Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum untuk mendukung terciptanya ketertiban dan ketentraman masyarakat

Program Daerah :

- a. Peningkatan pendidikan politik kewarganegaraan
- b. Peningkatan sarana dan prasarana keamanan lingkungan
- c. Koordinasi dan kerjasama keamanan lingkungan dengan aparat terkait
- d. Penyelesaian konflik horisontal secara dini, tepat, dan menyeluruh

- e. Peningkatan kesiagaan terhadap bencana
- f. Peningkatan peran keluarga sebagai kelompok sosial terkecil

4) Tujuan :

Terwujudnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak

Sasaran :

Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak

Program Daerah :

Peningkatan perlindungan perempuan dan anak

2. Misi II : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Adil, Terukur dan Akuntabel.

1) Tujuan :

Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik Prima

a) Sasaran :

Meningkatnya kualitas layanan publik kepada masyarakat

Program Daerah :

- 1) Efektivitas dan efisiensi pengolahan data dalam sistem manajemen informasi yang berkaitan dengan pelayanan publik

- 2) Perluasan akses publik terhadap informasi publik
- 3) Pengembangan sistem dan informasi data base daerah
- 4) Peningkatan fasilitas pelayanan publik
- 5) Optimalisasi saluran pengaduan layanan publik melalui berbagai media disertai dengan penanganan yang cepat dan tepat
- 6) Peningkatan layanan administrasi Kependudukan

b) Sasaran :

Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah

Program Daerah :

Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah

c) Sasaran :

Meningkatnya kualitas aparatur pemerintah daerah dalam melakukan pelayanan publik

Program Daerah :

- 1) Optimalisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
- 2) Pengembangan sistem rekrutmen jabatan yang bersih dari KKN

- 3) Pengembangan sistem pelatihan guna peningkatan kapasitas pengetahuan, nilai, dan ketrampilan aparatur
- 4) Optimalisasi pelaksanaan tunjangan pegawai yang berasaskan keadilan

2) Tujuan :

Terwujudnya Peningkatan kualitas peraturan daerah

Sasaran :

Meningkatnya kualitas dan legitimasi peraturan daerah

Program Daerah :

Peningkatan kapasitas anggota DPRD

Penataan dan Penegakan Peraturan Daerah

3) Tujuan :

Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan daerah

Sasaran :

Meningkatnya kualitas perencanaan daerah

Program Daerah :

- a) Peningkatan kuantitas dan kualitas kegiatan penelitian, pengembangan, dan statistik dalam perencanaan daerah
- b) Peningkatan kualitas musrenbang sebagai media serap aspirasi pembangunan daerah

3. Misi III : Mengembangkan potensi daerah dengan wawasan lingkungan yang berkesinambungan, adil dan ekonomis.

Tujuan :

Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup

1) Sasaran :

Menurunnya tingkat pencemaran lingkungan
perusakan lingkungan hidup

Program Daerah :

- a) Pembuatan kebijakan daerah untuk mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
- b) Peningkatan Pemantauan dan pengawasan terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
- c) Peningkatan penghijauan kota (Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH))
- d) Pengelolaan persampahan
- e) Peningkatan fasilitas sarana prasarana pertamanan dan dekorasi kota
- f) Pengelolaan PJU, PJK dan dekorasi kota

2) Sasaran :

Meningkatnya daya dukung tata ruang terhadap pembangunan

Program Daerah :

- a) Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang dan meningkatkan kesesuaian pemanfaatan lahan dengan rencana tata ruang
- b) Pengoptimalan pengawasan penyelenggaraan penataan ruang termasuk didalamnya melalui pengendalian pemanfaatan ruang
- c) Inventarisasi lahan aset daerah
- d) Pengendalian pemanfaatan lahan aset daerah
- e) Optimalisasi pemanfaatan lahan penunjang pembangunan daerah

4. Misi IV : Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat Kota Malang sehingga Bisa Bersaing di Era Global

1) Tujuan :

Terwujudnya kualitas dan relevansi pendidikan yang dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat

Sasaran :

Meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan

Program Daerah :

- a) Peningkatan mutu manajemen pendidikan
- b) Peningkatan profesionalisme guru dan tenaga Kependidikan
- c) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan

- d) Peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini
- e) Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan non-formal
- f) Peningkatan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus

2) Tujuan :

Terwujudnya peningkatan peran pemuda dalam pembangunan daerah

Sasaran :

Meningkatnya semangat profesionalitas pemuda dan budaya prestasi di kalangan pemuda

Program Daerah :

- a) Peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda
- b) Fasilitasi kesempatan berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi
- c) Peningkatan penyelenggaraan event-event olahraga bagi pemuda
- d) Pembinaan terhadap cabang-cabang olahraga daerah

5. Misi V : *Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat Kota Malang baik Fisik, maupun Mental untuk Menjadi Masyarakat yang Produktif.*

Tujuan :

Terwujudnya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat

Sasaran :

- 1) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana kesehatan dan tenaga kesehatan

Program Daerah :

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana/ prasarana kesehatan
2. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan

- 2) Meningkatnya kesehatan ibu dan anak

Program Daerah :

1. Peningkatan keselamatan dan kesehatan ibu melahirkan, bayi, dan balita

- 3) Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat

Program Daerah :

1. Peningkatan status gizi masyarakat
 2. Pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular
 3. Peningkatan promosi kesehatan
 4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
 5. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat miskin
 6. Pengembangan jaminan sosial pembiayaan kesehatan
- 4) Meningkatnya Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Program Daerah :

1. Pembinaan Kesehatan Keluarga melalui Program Keluarga Berencana

6. Misi VI : *Membangun Kota Malang sebagai Kota Tujuan Wisata yang Aman, Nyaman, dan Berbudaya.*

Tujuan :

Terwujudnya pengembangan pariwisata berbasis kebudayaan, lingkungan, dan kreativitas masyarakat

Sasaran :

- 1) Meningkatnya kelestarian seni budaya dan kearifan lokal, yang antara lain ditujukan guna meningkatkan daya tarik wisata.

Program Daerah :

1. Inventarisasi aset budaya tradisional Kota Malang, terutama yang dapat dikembangkan sebagai potensi wisata
 2. Inventarisasi dan pembinaan kelompok-kelompok budaya di Kota Malang
 3. Peningkatan dukungan dan apresiasi terhadap aktivitas kebudayaan oleh budayawan/seniman dan masyarakat
 4. Fasilitasi dan intensifikasi promosi wisata berbasis seni budaya
- 2) Meningkatnya ragam dan kualitas obyek wisata alam dan buatan

Program Daerah :

1. Pengembangan Destinasi Pariwisata

7. Misi VII : *Mendorong Pelaku Ekonomi Sektor Informal dan UKM agar Lebih Produktif dan Kompetitif.*

Tujuan :

1. Terwujudnya Produktivitas dan Daya Saing Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Sasaran :

- 1) Meningkatnya produktivitas dan daya saing pelaku usaha kecil menengah

Program Daerah :

- a. Pembuatan kebijakan daerah yang mendorong tumbuh kembangnya UKM
- b. Pembinaan kapasitas kelembagaan UKM
- c. Pembinaan manajemen keuangan UKM

2) Meningkatnya produktivitas dan daya saing pelaku usaha mikro

Program Daerah :

- a. Inventarisasi jumlah dan sebaran PKL serta Peningkatan bantuan kredit permodalan melalui fasilitasi hubungan dengan kalangan perbankan
- b. Pembangunan sentra-sentra PKL yang layak, yang terintegrasi dengan kawasan pengembangan kota
- c. Pembuatan kebijakan daerah yang melindungi keberadaan pasar tradisional
- d. Pengembangan kerjasama dengan berbagai pihak untuk memberdayakan pedagang pasar tradisional
- e. Penataan pasar tradisional kecamatan

3) Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Koperasi di Kota Malang

Program Daerah :

- a. Pembinaan pengelolaan dan keuangan koperasi

2. Terwujudnya peningkatan pengelolaan potensi pangan daerah

Sasaran :

1) Meningkatnya daya saing produk pangan daerah

Program Daerah :

1. Peningkatan produksi potensi unggulan daerah di bidang pertanian/ perkebunan, peternakan, dan perindustrian

2) Meningkatnya produk pangan lokal sebagai pendukung ketahanan pangan daerah

Program Daerah :

1. Peningkatan ketersediaan dan cadangan pangan daerah
2. Peningkatan penganekaragaman produksi pangan
3. Peningkatan distribusi bahan pangan

8. Misi VIII : *Mendorong Produktivitas Industri dan Ekonomi Skala Besar yang Berdaya Saing, Etis dan Berwawasan Lingkungan.*

Tujuan :

1. Terwujudnya Pertumbuhan industri-industri baru guna peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah

Sasaran :

1) Meningkatnya nilai investasi untuk pengembangan industri berskala besar

Program Daerah :

1. Peningkatan kebijakan daerah yang mendukung investasi

2) Meningkatnya penyerapan tenaga kerja industri

Program Daerah :

a. Peningkatan kualitas tenaga kerja

b. Peningkatan kesejahteraan tenaga kerja

c. Peningkatan fasilitasi konflik hubungan industrial

2. Terwujudnya kawasan industri terintegrasi yang memperhitungkan daya dukung lingkungan

Sasaran :

1) Terintegrasinya sentra industri kecil menengah

Program Daerah :

a. Optimalisasi alih Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam pengolahan produk unggulan

b. Pengembangan kawasan industri kecil menengah terpadu

9. Misi IX : *Mengembangkan Sistem Transportasi Terpadu dan Infrastruktur Yang Nyaman Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat.*

Tujuan :

1. Terwujudnya daya dukung transportasi

Sasaran :

1) Meningkatnya fungsi sarana transportasi

Program Daerah :

1. Penanganan persoalan kemacetan di berbagai ruas jalan

2. Peningkatan pengendalian pemanfaatan sarana transportasi dan perhubungan
 3. Peningkatan kapasitas kelembagaan perencana dan pelaksana sistem transportasi dan memperkuat koordinasi antar sektor dan pihak terkait
2. Terwujudnya Pengembangan sistem transportasi perkotaan terpadu yang menjamin kelancaran mobilitas masyarakat
- Sasaran :
- 1) Meningkatnya daya dukung sistem transportasi dan sarana perhubungan untuk menunjang mobilitas masyarakat
- Program Daerah :
1. Peningkatan pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan sarana bina marga
3. Terwujudnya ketersediaan infrastruktur perkotaan di bidang pemukiman dan drainase
- Sasaran :
- 1) Meningkatnya kualitas dan kuantitas ketersediaan infrastruktur pemukiman dan drainase
- Program Daerah :
- a. Penyediaan infrastruktur dasar di wilayah miskin
 - b. Peningkatan ketersediaan infrastruktur pemukiman rakyat yang layak
 - c. Peningkatan ketersediaan infrastruktur drainase
 - d. Pengelolaan TPU

Tabel 7.1

Kebijakan Umum Pembangunan Kota Malang 2013 – 2018

Misi : Menciptakan Masyarakat yang Makmur, Berbudaya dan Terdidik Berdasarkan Nilai-Nilai Spiritual yang Agamis, Toleran dan Setara

MISI 1 : Menciptakan Masyarakat yang Makmur, Berbudaya dan Terdidik Berdasarkan Nilai-Nilai Spiritual yang Agamis, Toleran dan Setara								
SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2013	2018			
Meningkatnya pemerataan kualitas kesejahteraan sosial masyarakat	Meningkatkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial	1. Peningkatan kesejahteraan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terklasifikasi:	37363	30456	1. Pembinaan PMKS	SOSIAL	DINAS SOSIAL
			a) ODHA	350	325			
			b) Korban NAPZA	51	25			
			c) Pengemis	184	150			

			d) Gelandangan	56	46			
			e) Tunasusila	35	29			
			f) Anak Jalanan	227	185			
			g) Lanjut Usia Terlantar	174	142			
			h) Fakir Miskin	36286	29555			
			2. Jumlah relawan sosial terlatih pendamping PMKS	26.67%	90.00%			
			3. Persentase (%) PMKS skala Kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	0.11%	46.20%			

			4. Persentase (%) PMKS skala Kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	61.12%	82.10%			
			5. persentase (%) panti sosial skala Kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	50.00%	88.24%			
			6. persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	0.00%	60.00%			

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA MALANG TAHUN 2013 - 2018

			7. persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	11%	86%	2. Peningkatan fasilitas penanganan PMKS	SOSIAL	DINAS SOSIAL
			8. persentase (%) korban bencana skala Kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	100%	3. Peningkatan kerjasama guna pembinaan PMKS	SOSIAL	DINAS SOSIAL
			9. persentase (%) korban bencana skala Kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100%	100%			

			10. Prosentase ketersediaan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial pada panti sosial (panti asuhan, panti jompo, panti rehab cacat, dll)	50%	88%			
			11. Jumlah lembaga yang membantu pelaksanaan kesejahteraan sosial	80.00%	80.00%			
	Pemberdayaan masyarakat miskin	2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin	1. Prosentase (%) penurunan angka kemiskinan	5.20%	4.70%	1. Optimalisasi bantuan program bagi warga miskin	SOSIAL	BKBPM
			2. Cakupan masyarakat/ kelompok masyarakat miskin yang mendapat pelatihan ketrampilan	1.09%	2.08%	2. Peningkatan pelatihan ketrampilan untuk pemberdayaan masyarakat miskin	SOSIAL	BKBPM, KELURAHAN

			3. Cakupan masyarakat/ kelompok masyarakat miskin yang mendapat bantuan sarana dan prasarana usaha	0.54%	1.04%	3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	PEMBER DAYA-AN MASYARAKAT	BKBPM, KECAMATAN, KELURAHAN
			4. Cakupan masyarakat/ kelompok masyarakat miskin yang terfasilitasi dalam memperoleh modal usaha	34.99%	42.73%			
Meningkatnya kualitas kehidupan sosial beragama	Meningkatkan peran lembaga keagamaan/ tokoh agama, pendidikan, keagamaan dan sosial budaya dalam pembinaan keumatan dan kemasyarakatan	Peningkatan kegiatan-kegiatan keagamaan, terutama di bidang pendidikan keagamaan dan kerukunan umat beragama	1. Ratio Tempat ibadah per satuan penduduk	3 : 1.000	3 : 1.000	Fasilitasi kebutuhan masyarakat di bidang keagamaan	SOSIAL	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT - SETDA

			2. Cakupan tempat ibadah yang menerima bantuan perbaikan	20/1786	75/1786			
			3. Cakupan modin penerima tunjangan	980/980	1088/1088			
			4. Cakupan pendidik keagamaan penerima tunjangan	6400/6252	6750/6750			
			5. Cakupan peningkatan kapasitas bagi pendidik keagamaan	0/6252	500/6750			
			6. Jumlah kegiatan dialog dan kerjasama yang dilakukan oleh kelompok masyarakat lintas agama dan keyakinan	5	5			

Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum untuk mendukung terciptanya ketertiban dan ketentraman masyarakat	Meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat	1. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam bidang sosial, politik, dan hukum	1. Persentase keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif	26.67%	30%	Peningkatan pendidikan politik kewarganegaraan	Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			2. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu	65%	0%			
			3. Persentase partisipasi pemilih dalam Pilpres	65%	0%			
			4. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilukada	62%	100%			
		2. Peningkatan sarana dan prasarana keamanan lingkungan	1. Persentase penanganan konflik/ kekerasan berbasis SARA	100%	100%	1. Peningkatan sarana dan prasarana keamanan lingkungan	Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

			2. Rasio Poskamling per jumlah 100 KK	1 : 100	1 : 100	2. Koordinasi dan kerjasama keamanan lingkungan dengan aparat terkait	Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			3. Prosentase keaktifan RW dalam mengadakan siskamling	50%	100%			
			4. Rasio Petugas Linmas (1 RT 1 Linmas pada 2014)	0.63	2.00			
			5. Rasio Polisi Pamong Praja per 10,000 penduduk	1.644	2.968			
			6. Persentase konflik yang termediasi (konflik/perkelahian antar kelompok pemuda, pelajar/mahasiswa, antar kampung)	100%	100%	3. Penyelesaian konflik horisontal secara dini, tepat, dan menyeluruh	Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK, KELURAHAN

			7. Persentase organisasi antisipasi/ siaga bencana yang memiliki SDM terlatih dan perlengkapan standar penanganan bencana	100%	100%	4. Peningkatan kesiagaan terhadap bencana	Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			8. Prosentase keaktifan koordinasi Muspika (Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan)	100%	100%			KECAMATAN
		3. Peningkatan Pembinaan kelompok/organisasi masyarakat	1. Jumlah organisasi perempuan	29	30	1. Peningkatan peran keluarga sebagai kelompok sosial terkecil	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	BKBPM
			2. Persentase kegiatan organisasi perempuan yang difasilitasi	100%	100%			

			3. Persentase organisasi/ kelompok yang mengembangkan pembinaan keluarga	100% (29 organisasi)	100%			
Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Peningkatan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak	1. Persentase kegiatan pembinaan dan pengembangan fungsi keluarga yang difasilitasi	100%	100%	2. Peningkatan perlindungan perempuan dan anak	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	BKBPM
			2. Jumlah lembaga perlindungan anak	1	5			
			3. Persentase terselenggaranya kegiatan/ forum anak yang difasilitasi	10%	10%			
			4. Persentase penanganan kasus tindakan KDRT	100%	100%			

			5. Persentase penanganan kasus tindakan asusila	100%	100%			
			6. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100%	100%			
			6. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di RS.	0%	100%			

			7. Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	0%	100%			
			8. Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	0%	100%			

			9. Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.	0%	100%			
			10. Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	0%	100%			

Tabel 7.2

Kebijakan Umum Pembangunan Kota Malang 2013 – 2018

Misi : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Adil, Terukur dan Akuntabel

MISI 2 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Adil, Terukur dan Akuntabel

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2013	2018			
Meningkatnya kualitas layanan publik kepada masyarakat	Meningkatkan pelaksanaan reformasi pelayanan publik	1. Peningkatan kuantitas dan kualitas data dan informasi yang berkaitan dengan pelayanan publik	1. Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintah daerah	25	25	1. Efektivitas dan efisiensi pengolahan data dalam sistem manajemen informasi yang berkaitan dengan pelayanan publik	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

			2. Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui Media massa seperti majalah, radio, dan televisi 12 kali/tahun	12	12	2. Perluasan akses publik terhadap informasi publik		
			3. Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui Media baru seperti website (media online) setiap hari	365	365			

			4. Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui Media tradisional seperti pertunjukan rakyat 12 kali/tahun	12	12			
			5. Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/ diskusi, dan lokakarya 12 kali/tahun setiap kecamatan	12	12			

			6. Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho 12 kali/tahun	12 kali 4.000 lbr	12 kali 4.000 lbr			
			7. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di Tingkat kecamatan	180% (9 KIM 5 Kec.)	100% (5 Kecamatan)			
			8. Cakupan pengguna informasi publik yang terlayani	100%	100%			

			9.Persentase informasi publik yang bisa diakses publik melalui website pemerintah daerah	100%	100%			
			Adanya sistem pengelolaan data dan arsip daerah yang bisa diakses oleh masyarakat	Belum	Ada	1. Pengembangan sistem dan informasi data base daerah	KEARSIPAN	KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM DAN ARSIP DAERAH
		2. Peningkatan ketersediaan fasilitas pelayanan publik dan kecepatan layanan di bidang perijinan	1. Adanya SOP pelayanan informasi publik	Ada	Ada	1. Peningkatan fasilitas pelayanan publik	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	SELURUH SKPD

			3. Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal	ada	ada			
			5. Terimplementasinya sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik	100%	100%			
			5. Prosentase meningkatnya jumlah Izin Terbit IMB	11.9%	22%			
			6. Lamanya proses penerbitan izin IMB, IG, Trayek dan IUJK					

			<ul style="list-style-type: none"> • IMB : <ul style="list-style-type: none"> - langsung proses BP2T 	4 Hari	4 Hari			
			<ul style="list-style-type: none"> - butuh rekom DPU 	8 Hari	8 Hari			
			<ul style="list-style-type: none"> • IG 	9 Hari	9 Hari			
			<ul style="list-style-type: none"> • Trayek 	4 Hari	4 Hari			
			<ul style="list-style-type: none"> • IUJK : <ul style="list-style-type: none"> - baru - her regist. - perpanjang - rusak 	8 Hari 2 Hari 8 Hari 4 Hari	8 Hari 2 Hari 8 Hari 4 Hari			
			7. Prosentase kasus tumpang tindih fungsi dan tugas yang terselesaikan	100%	100%			
			8. Prosentase SOP penyelenggaraan pemerintahan yang diterapkan	2% (2 SOP)	100%			
			9. Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran	100%				
			10. Persentase pelaksanaan sarana dan prasarana	100%				

			aparatur					
			11. Prosentase pengaduan yang terselesaikan	100%		2. Optimalisasi saluran pengaduan layanan publik melalui berbagai media disertai dengan penanganan yang cepat dan tepat	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	SELURUH SKPD
Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan	3. Peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang kependudukan	1. Cakupan penerbitan Kartu tanda Penduduk (KTP)	90.89%	100%	Peningkatan layanan administrasi Kependudukan	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	

			2. Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran	82%	96.80%			
			3. Cakupan penerbitan Kartu Keluarga	91.70%	100%			
			4. Cakupan penerbitan kutipan akta kematian	10%	85%			
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah	Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah	3. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pendapatan dan belanja daerah	1. Adanya hasil pemetaan mengenai potensi peningkatan pendapatan daerah	ada	ada	3. Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	SELURUH SKPD

			2. Adanya proyeksi peningkatan pendapatan daerah	ada	ada			
			3. Prosentase peningkatan pendapatan daerah	49.9%	79%			
			4. Hasil audit LKD oleh BPK	WTP	WTP			
			5. Persentase pelaksanaan administrasi capaian kinerja keuangan	100%	100%			
Meningkatnya kualitas aparatur pemerintah daerah dalam melakukan pelayanan publik	Meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi	1. Peningkatan Pengawasan Aparatur	Adanya sistem evaluasi kinerja pemerintah daerah	ada	ada	1. Optimalisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandi	INSPEKTORAT

							an	
		2. Peningkatan Sistem Manajemen SDM Aparatur	1. Adanya mekanisme rekrutmen jabatan yang akuntabel	ada	ada	2. Pengembangan sistem rekrutmen jabatan yang bersih dari KKN	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	BKD

			Persentase jumlah aparatur yang naik pangkat	100%	100%			
			Jumlah aparatur pensiun dan MPP	361	1899			
			1. Jumlah Aparatur yang mengikuti Ujian Dinas	120 org	KPPI dan Ujian Dinas : 550 org	1. Pengembangan sistem pelatihan guna peningkatan kapasitas pengetahuan, nilai, dan ketrampilan aparatur	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	SELURUH SKPD
			2. Persentase peningkatan ketrampilan dan profesionalisme aparatur	0.70%	8%			

			3. Persentase Aparatur yang sedang tugas belajar	0.3%	0.5%		
			4. Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat MOT	0	2		
			5. Persentase Aparatur yang mengikuti ADUM/diklatpim tingkat IV	47.5%	79%		
			6. Persentase Aparatur yang mengikuti SPAMA/diklatpim tingkat III	82%	100%		
			7. Persentase Aparatur yang mengikuti SPAMEN/diklatpim tingkat II	67%			
			8. Persentase Aparatur yang mengikuti diklat prajabatan golongan I	0%	100%		

		9. Persentase Aparatur yang mengikuti diklat prajabatan golongan II	0%	100%			
		10. Persentase Aparatur yang mengikuti diklat prajabatan golongan III	0%	100%			
		11. Persentase Aparatur yang mengikuti diklat administrasi pemerintahan Kelurahan	0%	100%			
		12. Persentase Aparatur yang mengikuti diklat manajemen pengelola barang dan Asset	79%	100%			
		13. Persentase Aparatur yang mengikuti diklat penatausahaan keuangan daerah	0%	79%			

			16. Persentase aparaturn Pemadam Kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	6.3%	100%			
						2. Optimalisasi pelaksanaan tunjangan pegawai yang berasaskan keadilan	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	BKD, DKP, DISHUB, SATPOL PP, BAG. UMUM
			2. Persentase pejabat yang mengisi dan menyerahkan LHKPN	84%	100%			BKD

Meningkatnya kualitas dan legitimasi peraturan daerah	Meningkatkan kualitas, akuntabilitas, dan legitimasi peraturan daerah	1. Peningkatan kualitas substansi peraturan daerah	1. Persentase perda yang melibatkan partisipasi masyarakat	100%	100 % (48 Perda)	1. Peningkatan kapasitas anggota DPRD	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	SEKRETA RIAT DPRD
			2. Jumlah Perda Inisiatif masyarakat	100%	40 Perda			
			3. Cakupan anggota DPRD yang telah mengikuti program peningkatan kapasitas SDM	100% (45 org dari 45 org anggota DPRD)	100% (45 org dari 45 org anggota DPRD)			

		2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembuatan peraturan daerah	Persentase keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, penyusunan dan evaluasi perda	100%	100%	2. Penataan dan Penegakan Peraturan Daerah	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	SELURUH SKPD
			Cakupan penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	80%	100%			
			Patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	1.2	2.4			

Meningkatnya kualitas perencanaan daerah	Mengembangkan sistem perencanaan daerah integratif, dengan keterlibatan publik yang seluas-luasnya	1. Peningkatan kualitas perencanaan daerah				1. Peningkatan kuantitas dan kualitas kegiatan penelitian, pengembangan, dan statistik dalam perencanaan daerah	STATISTIK	BAPPEDA
		2. Peningkatan partisipasi publik dalam perencanaan daerah	1. Jumlah hasil penelitian perencanaan pembangunan ekonomi	3 penelitian	12 penelitian	3. Peningkatan kualitas musrenbang sebagai media serap aspirasi pembangunan daerah	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	BAPPEDA & SELURUH SKPD
			2. Jumlah hasil penelitian perencanaan pengembangan kota	4 penelitian	6 penelitian			
			3. Jumlah penelitian perencanaan sosial budaya	10 penelitian	3 penelitian			

			4. Jumlah publikasi hasil musrenbang kelurahan	57	57			
			5. Jumlah publikasi hasil musrenbang kecamatan	5	5			
			6. Prosentase tingkat kehadiran peserta Musrenbang	100% (150 orang)	100% (150 orang)			
			7. Jumlah Musrenbangcam yang memiliki tingkat kehadiran di atas 80%	5	5			
			8. Jumlah Musrenbangkel yang memiliki tingkat kehadiran di atas 80%	57	57			

			9.Persentase partisipasi perempuan dalam kegiatan musrenbang kota	30% (50 orang)	30% (50 orang)			
			10. Jumlah Musrenbangcam yang memiliki tingkat partisipasi perempuan minimal 30%	5	5			
			11. Jumlah Musrenbangkel yang memiliki tingkat partisipasi perempuan minimal 30%	57	57			

Tabel 7.3

Kebijakan Umum Pembangunan Kota Malang 2013 – 2018

Misi : Mengembangkan potensi daerah dengan wawasan lingkungan yang berkesinambungan, adil dan ekonomis

MISI 3 : Mengembangkan potensi daerah dengan wawasan lingkungan yang berkesinambungan, adil dan ekonomis.								
SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2013	2018			
Menurunnya tingkat pencemaran lingkungan perusakan lingkungan hidup	Meningkatkan pengendalian terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	1. Peningkatan perencanaan pengendalian terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	1. Jumlah Perda di Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup	5	13	Pembuatan kebijakan daerah untuk mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	LINGKUNGAN HIDUP	BADAN LINGKUNGAN HIDUP, DKP
			2. Adanya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Belum ada	Ada			

			3. Adanya Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Belum ada	Ada			
		2. Optimalisasi pengawasan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	4. Persentase jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya, ditetapkan status mutu airnya dan diinformasikan status mutu airnya	0%	100%	Peningkatan Pemantauan dan pengawasan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	LINGKUNGAN HIDUP	BADAN LINGKUNGAN HIDUP
			5. Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100%	100%			

			6. Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	25%	100%			
			7. Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara	6%	100%			BADAN LINGKUNGAN HIDUP, DKP
			8. Persentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan	0%	100%			

			status kerusakannya				
			9. Persentase pemantauan terhadap penanganan air limbah	75%	100%		
			10. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal	50%	100%		
			11. Persentase Industri yang memiliki AMDAL/izin lingkungan	0%	100%		
			12. Persentase perumahan yang memiliki izin lingkungan	0%	100%		
			13. Persentase kegiatan ekonomi yang memiliki dokumen lingkungan/izin lingkungan	0%	100%		

			14. Jumlah monitoring pelaksanaan AMDAL setiap tahun	5	75			
			15. Persentase Peningkatan kualitas air, udara, tanah (%)	50%	100%			
		3. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	16. Jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan	3	30			
	Peningkatan keindahan kota berbasis pelestarian lingkungan	4. Optimalisasi potensi Ruang Terbuka Hijau	17. Persentase luasan ruang terbuka hijau	15.92%	16.05%	1. Peningkatan penghijauan kota (Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH))	LINGKUNGAN HIDUP	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMAAN
			18. Jumlah ruas jalan terhijsaukan	59	319			

			19. Persentase kawasan terhidaukan	15.92%	16.05%			
	5. Peningkatan kebersihan kota		20. Persentase sampah terolah	30.18%	31%	Pengelolaan persampahan	LINGKUNGAN HIDUP	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
			21. Rasio pasukan kuning per 100 KK	0.32	0.36		LINGKUNGAN HIDUP	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
			22. Rasio gerobak pengangkut sampah per 100 KK	0.74	0.88	1. Pengembangan dan peningkatan penanganan persampahan perkotaan		
			23. Rasio kontainer di setiap TPS per 1000 KK	0.32	0.49			
			24. Rasio tempat pembuangan sampah sementara per 1000 KK	0.26	0.26			

			25. Luasan TPA terbangun	30,5 Ha	50 Ha			
			26. Persentase volume sampah yang tertangani	95.42%	96%			
			27. Jumlah kelompok masyarakat yang memanfaatkan sampah	509	1009			
		6. Peningkatan keindahan lingkungan kota	28. Persentase taman kota terpelihara	100%	100%	1. Peningkatan fasilitas sarana prasarana pertamanan dan dekorasi kota	LINGKUNGAN HIDUP	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
			29. Persentase tersedianya penerangan jalan umum pada jalan kota	63.66%	70.36%			
			30. Jumlah kerjasama dengan pihak lain dalam pemeliharaan taman kota	1	6			

			31. Persentase Penerangan Jalan Umum kota terpelihara	100%	100%	Pengelolaan PJU, PJL dan dekorasi kota	LINGKUNGAN HIDUP	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
Meningkatnya daya dukung tata ruang terhadap pembangunan	Peningkatan pengendalian dan pengawasan program pembangunan terkait tata ruang	1. Sinkronisasi program pembangunan dengan rencana tata ruang wilayah;	1. Persentase penurunan pelanggaran tata ruang	20%		1. Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang dan meningkatkan kesesuaian pemanfaatan lahan dengan rencana tata ruang	PENATAAN RUANG	BAPPEDA, DINAS PU - PPB
			2. Persentase Penanganan pengaduan terhadap pelanggaran lingkungan hidup dan tata ruang	90%	100%	2. Pengoptimalan pengawasan penyelenggaraan penataan ruang termasuk didalamnya melalui pengendalian pemanfaatan ruang	PENATAAN RUANG	BAPPEDA, DINAS PU - PPB

Optimalisasi pemanfaatan lahan perkotaan guna pembangunan	1. Peningkatan pemanfaatan lahan yang merupakan aset daerah	3. Adanya hasil inventarisasi tanah dan bangunan aset daerah	Ada	Ada	1. Inventarisasi lahan aset daerah	PERTANAHAN	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		4. Persentase lahan aset yang sudah bersertipikat	38%	60%			
		5. Persentase penyelesaian sengketa lahan aset daerah	100%	100%	2. Pengendalian pemanfaatan lahan aset daerah	PERTANAHAN	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		6. Persentase bidang lahan aset daerah penyumbang pendapatan asli daerah	51.13%	51.13%	3. Optimalisasi pemanfaatan lahan penunjang pembangunan daerah	PERTANAHAN	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA MALANG TAHUN 2013 - 2018

			7. Jumlah pendapatan asli daerah dari pemanfaatan bidang lahan aset daerah	Rp 3,265,000,000.00	Rp 5,475,734,000.00			
--	--	--	--	------------------------	------------------------	--	--	--

Tabel 7.4

Kebijakan Umum Pembangunan Kota Malang 2013 – 2018

Misi : Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat Kota Malang sehingga Bisa Bersaing di Era Global

MISI 4 : Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat Kota Malang sehingga Bisa Bersaing di Era Global								
SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2013	2018			
Meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan	Meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan	1. Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan	Prosentase sekolah yang memiliki renstra sekolah (RKAS)	551 sekolah	100%	1. Peningkatan mutu manajemen pendidikan	PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
			Prosentase sekolah yang berhasil mengimplementasikan renstra sekolah (RKAS)	551 sekolah	100%			

			<p>Prosentase kehadiran pengawas ke satuan pendidikan Intensitas kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan</p>	<p>75% (320/((36x(4 25/36))x x 100% pengawas TK/SD : skn:3 blim:3 low:3 ked:2 klo:4 pengawas SMP/SMA : 15 pengawas SMK : 6)</p>	<p>100%</p>			
			<p>Persentase Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka:</p>	<p>100% (318 sekolah seluruhnya melaksanakan akan 18 jam per minggu)</p>	<p>100%</p>			
			<p>a) Kelas I – II : 18 jam per minggu;</p>	<p>100% (318 sekolah seluruhnya melaksanakan akan 18 jam per minggu)</p>	<p>100%</p>			

			b) Kelas III : 24 jam per minggu;	100% (318 sekolah seluruhnya melaksanakan akan 18 jam per minggu)	100%			
			c) Kelas IV - VI : 27 jam per minggu; atau	100% (318 sekolah seluruhnya melaksanakan akan 18 jam per minggu)	100%			
			d) Kelas VII - IX : 27 jam per minggu	100% (318 sekolah seluruhnya melaksanakan akan 18 jam per minggu)	100%			
			Persentase satuan pendidikan dasar yang menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku	100% 318 sekolah seluruhnya melaksanakan akan 18 jam per minggu	100%			

			Persentase Kepala sekolah yang melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester	100% 551 kepala sekolah seluruhnya melaksanakan akan supervisi	100%			
			Persentase Kepala sekolah atau madrasah yang menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kota Malang atau	100% 551 kepala sekolah seluruhnya yang menyampaikan laporan	100% 551 kepala sekolah seluruhnya yang menyampaikan laporan			

			Kantor Kementerian Agama Kota Malang pada setiap akhir semester				
			Persentase satuan pendidikan dasar yang menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)	100% 318 sekolah seluruhnya menerapkan prinsip- prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)	100% 318 sekolah seluruhnya menerapkan prinsip- prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)		
			Angka Kelulusan				
			- AL SD/MI	99.21%	99.25%		
			- AL SMP/MTs	99.63%	99.68%		
			- AL SMA/SMK/MA	99.08%	100%		
			Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTS	105.50%	110%		

			Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTS ke SMA/SMK/MA	141.81%	146.80%			
			Jumlah sekolah berpredikat Adiwiyata					
			- SD/MI	11	11			
			- SMP/MTS	6	6			
			- SMA/MA/SMK	8	8			
			Jumlah pameran karya siswa	2	10			
			Jumlah karya siswa yang terpublikasi secara lokal, regional, nasional dan internasional	2	10			
			Jumlah siswa yang memiliki karya inovatif	2	10			
			Jumlah siswa yang diberi <i>reward</i> atas karya inovatif mereka	2	10			

			Angka partisipasi murni					
			- APM SD/MI/Paket A	102.44	107.44			
			- APM SMP/MTS/Paket B	75.38	80.38			
			- APM SMA/MA/SMK/Paket C	81.88	86.88			
			Persentase SD/MI per jumlah total SD/MI					
			- Klojen	10.08	10.08			
			- Kd.kandang	26.61	26.61			
			- Blimbing	19.75	19.75			
			- Lowokwaru	20.56	20.56			
			- Sukun	21.77	21.77			
			Persentase SMP/MTs per jumlah total SMP/MTs					
			- Klojen	24.39	24.39			
			- Kd.kandang	21.95	21.95			
			- Blimbing	18.69	18.69			
			- Lowokwaru	20.32	20.32			

			- Sukun	14.63	14.63			
			Persentase SMA/MA/SMK per jumlah total SMA/MA/SMK					
			- Klojen	30	30			
			- Kd.kandang	16.36	16.36			
			- Blimbing	13.64	13.64			
			- Lowokwaru	24.55	24.55			
			- Sukun	15.45	15.45			
			Angka Partisipasi Kasar (APK)					
			- APK SD/MI	114.78	120			
			- APK SMP/MTS	104.19	109			
			- APK SMA/MA/SMK	112.32	117			
			Angka melek huruf masyarakat	98.50%	98.90%			
			Angka Putus Sekolah (APS)					
			- APS SD/MI	0.05	0			
			- APS SMP/MTS	0.19	0.14			

			- APS SMA/SMK/MA	0.72	0.63			
			Persentase Kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 dan telah memiliki sertifikat pendidik	100% (319 Kasek SD sudah berkualifikasi S1)	100%	2. Peningkatan profesionalisme guru dan tenaga Kependidikan	PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
			Persentase kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 dan telah memiliki sertifikat pendidik	100% (123 Kasek SMP berkualifikasi S1)	100%			
			Persentase pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	100% (36 orang pengawas memiliki S1)	100%			

			Persentase guru yang menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik	100% (11.625 guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran	100%			
			Persentase guru tetap yang bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing	100% (7856 guru tetap yang bekerja 37,5 jam per minggu	100%			

			atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan				
			Persentase guru yang mampu menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya	100% (11.625 guru yang mampu menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)	100%		
			Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV perjenjang pendidikan	100% (319 Kasek SD sudah berkualifikasi S1)	100%		
			Jumlah guru yang dikirim untuk mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas guru	5409	6000		

			atau sejenisnya				
			Rasio guru / murid per kelas				
			- SD/MI	1.63	1.63		
			- SMP/MTS	2.20	2.20		
			- SMA/MA	2.69	2.69		
			- SMK	2.35	2.35		
			Persentase Ketersediaan 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan pada SD/MI	81.88	86.88		
			Persentase Ketersediaan 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D- IV di SD/MI	70.31	75.31		

			Persentase Ketersediaan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik pada setiap SD/MI	70.31	75.31			
			Persentase Ketersediaan guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik pada setiap SMP/MTs	91.53	96.53			

			Persentase Ketersediaan guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing dua orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris pada setiap SMP/MTs	27.97	32.97			
			Rasio guru / murid					
			- SD/MI	18.33	18.33			
			- SMP/MTS	13.23	13.23			
			- SMA/MA	9.37	9.37			
			- SMK	7.22	7.22			
			Rasio ketersediaan sekolah/			3. Peningkatan sarana dan prasarana	PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN

			penduduk usia sekolah			pendidikan		
			- SD/MI	1:237	1:237			
			- SMP/MTS	1:314	1:314			
			- SMA/MA/SMK	1:417	1:409			
			Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk	48.75	55.32			

			peserta didik dan guru, serta papan tulis				
			Persentase SD/MI dengan Kondisi bangunan baik	56.88	65.69		
			Persentase SMP/MTs dengan kondisi baik	69.11	74.11		
			Persentase SMA/MA/SMK dengan kondisi bangunan baik	55.56	61.36		
			Persentase Ketersediaan ruang lab IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan	74.80	81		

			eksperimen peserta didik pada setiap SMP/MTs				
			Prosentase jumlah SMA/MA yang memiliki ruang lab Bahasa yang dilengkapi peralatan multimedia	50.84 (30 SMA memiliki lab bahasa /59 jumlah SMA)	59.32		
			Prosentase jumlah SMA/MA yang memiliki ruang lap IPA	40.67 (24 sekolah memiliki ruang lab/59 SMA)	57.63		
			Prosentase jumlah SMK yang memiliki ruang kerja praktek setiap jurusan	95.92	100		
			Persentase Ketersediaan satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang	100% dari 318 sekolah	100% dari 318 sekolah		

			guru SD/MI				
			Persentase Ketersediaan satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru SMP/MTS	81.3% (100 guru yang telah dilengkapi meja kursi dibandingg 123 guru	100		
			Persentase Ketersediaan ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru di setiap SMP/MTs	95.93	100		
			Persentase Ketersediaan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS	71.39 ('62.156 buku teks/87.065 peserta didik)	100		

			dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik pada setiap SD/MI					
			Persentase Ketersediaan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik pada setiap SMP/MTs	59.36 (23507 buku teks /39598 peserta didik)	100.00			

			Persentase Ketersediaan 1 (satu) set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA pada setiap SD/MI	36.25 (116 sat peraga IPA/320 SD)	75			
			Persentase sekolah memiliki fasilitas penunjang berupa kamar mandi siswa laki-laki dan perempuan	87.54 (464 sekolah dengan kamar mandi/530 seluruh sekolah)	93.58			
			Persentase sekolah yang memiliki fasilitas olah raga yang layak	58.11 (308 sekolah yg memiliki saraba olahraga/53)	63.11			

				0 sekolah)				
			Persentase Ketersediaan sarana IT dalam penyelenggaraan pendidikan	81.13 (430 sekolah yang memiliki sarana IT/530 sekolah)	90.57			
			Persentase Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil	100% (530 sekolah seluruhnya memiliki jarak yang terjangkau	100%			
			Jumlah pengunjung perpustakaan keliling pertahun	8.160 Orang	9,000		PENDIDI KAN	KANTOR PERPUST AKAAN DAN ARSIP DAERAH

			Cakupan perpustakaan kelurahan	57 kel.102 perpustakaan	152 perpustakaan binaan			
			Jumlah pengunjung perpustakaan kota	240.045 orang	250.000 pengunjung			
			Jumlah judul buku di perpustakaan kota	141.794 eksemplar	169794 eksemplar			
			Adanya Fasilitas virtual library di perpustakaan kota	1 paket	1 paket			
			Jumlah sarana kendaraan perpustakaan keliling	7 unit	12 unit			
			Jumlah Taman Baca Masyarakat (TBM)	102	152			
		2. Pemerataan jangkauan pendidikan	Jumlah lembaga PAUD setiap RW	2 (2 lembaga PAUD setiap RW)	3	5. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini	PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA MALANG TAHUN 2013 - 2018

			Jumlah peserta PAUD	19,132				
			Persentase peserta PAUD/ anak usia PAUD	37.89%	42.89%			
			Jumlah lembaga bimbingan belajar	202	206	6. Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan non-formal	PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
			Persentase LSM yang bergerak di bidang pendidikan non-formal	2	2			
			Jumlah lomba minat-bakat tingkat kota	1 kali	5 kali			
			Jumlah partisipasi dalam lomba minat-bakat di tingkat Jawa Timur	1 kali	5 kali			
			Jumlah partisipasi dalam lomba minat-bakat di tingkat nasional	1 kali	5 kali			

			Jumlah prestasi dalam lomba minat-bakat di tingkat Jawa Timur	1 kali	5 kali			
			Jumlah prestasi dalam lomba minat-bakat di tingkat Nasional	1 kali	5 kali			
			Jumlah prestasi dalam lomba minat-bakat di tingkat internasional	1 kali	5 kali			
			Jumlah bantuan yang diberikan pada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)	31	36.64	2. Peningkatan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus		
			Rasio SLB/ jumlah ABK	1:53 (1 SLB terdapat 53 siswa ABK)	1:48			
			Rasio guru/jumlah ABK	1:20 (1 guru mengajar 20 siswa ABK)	14.57			

			Jumlah kerjasama dengan pihak lain dalam hal pemerataan akses pendidikan bagi keluarga miskin	1 kerjasama	1 kerjasama			
			Persentase siswa keluarga miskin yang memperoleh beasiswa dari pihak swasta	100% (7000 siswa)	100%			
			Rasio fasilitas kendaraan antar jemput sekolah/ jumlah siswa miskin	2 kendaraan (untuk SMK 13)	5 kendaraan			
			Persentase sekolah yang melakukan audit independen oleh KAP	0%	20 sekolah			
			Persentase sekolah yang mempublikasikan laporan keuangan secara	100% (530 sekolah)	100% (530 sekolah)			

			terbuka					
			Adanya kebijakan sebagai pencegahan penyalahgunaan dana pendidikan	Tidak ada	Ada			
			Persentase penanganan terhadap pengaduan masyarakat terkait penyalahgunaan biaya penyelenggaraan pendidikan	100% (seluruh penaduan tertangani)	100%			
Meningkatnya semangat profesionalitas pemuda dan budaya prestasi di kalangan pemuda	Peningkatan pelayanan kepemudaan dalam upaya pemberdayaan dan prestasi	1. Peningkatan profesionalitas pemuda dalam menunjang pembangunan daerah	Jumlah pelatihan pemberdayaan pemuda	3	26	1. Peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
			Jumlah Industri Olahraga	51	60			

			Jumlah fasilitasi pembinaan industri olahraga	0	3			
			Jumlah kegiatan kepemudaan	8	32			
			Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP)	240	240			
		2. Peningkatan budaya prestasi pemuda, khususnya di bidang olahraga	Prosentase keaktifan organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) aktif	22%	40%	2. Fasilitasi kesempatan berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
			Jumlah fasilitasi kegiatan organisasi pemuda dan olahraga	1	6			
			Jumlah pemuda berprestasi di tingkat Jawa Timur	25				
			Jumlah pemuda berprestasi di tingkat Nasional	1	5			

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA MALANG TAHUN 2013 - 2018

			Jumlah even olahraga tingkat kota	4	22	1. Peningkatan penyelenggaraan event-event olahraga bagi pemuda	KEPEMU DAAN DAN OLAHRA GA	DINAS KEPEMU DAAN DAN OLAHRA GA
			Jumlah partisipasi event olahraga di tingkat Jawa Timur	4	22			
			Jumlah partisipasi event olahraga di tingkat nasional	4	22			
Peningkatan kualitas pelayanan fasilitas olahraga	Peningkatan sarana dan prasarana olahraga		Jumlah prestasi olahraga di tingkat Jawa Timur	20	19	2. Pembinaan terhadap cabang-cabang olahraga daerah	KEPEMU DAAN DAN OLAHRA GA	DINAS KEPEMU DAAN DAN OLAHRA GA
			Jumlah prestasi olahraga di tingkat Nasional	45	70			
			Jumlah organisasi olahraga prestasi	37	50			

			yang dibina				
			Jumlah kegiatan pembinaan organisasi olah raga prestasi	42	65		
			Jumlah fasilitasi pembinaan olahraga	0	4		
			Jumlah lapangan olahraga	20	24		
			Jumlah pembangunan lapangan olahraga	0	6		
			Persentase pemeliharaan lapangan olahraga	70%	70%		
			Jumlah kegiatan pembinaan atlit	0	4		
			Jumlah club olahraga	145	175		
			Jumlah cabang olahraga	42	65		

Tabel 7.5

Kebijakan Umum Pembangunan Kota Malang 2013 – 2018

Misi : Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat Kota Malang baik Fisik, maupun Mental untuk Menjadi Masyarakat yang Produktif

MISI 5 : Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat Kota Malang baik Fisik, maupun Mental untuk Menjadi Masyarakat yang Produktif								
SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2013	2018			
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana kesehatan dan tenaga kesehatan	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan	1. Peningkatan kualitas layanan kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah kota	0	1	1. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana/ prasarana kesehatan	KESEHATAN	DINAS KESEHATAN

			Persentase puskesmas yang memiliki fasilitas VCT, HCT dan IMS	13%	53%			
			Rasio Rumah Sakit terhadap penduduk (tiap 10.000 penduduk)	0.28	0.31			
			Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (tiap 1000 penduduk)	1.09	1.09			
			Persentase rumah sakit yang telah terakreditasi	42% 10 RS dari 24 RS	75% 18 RS dari 24 RS			
			Rasio dokter puskesmas terhadap penduduk (tiap 1.000 penduduk)	0.09 1 dokter untuk 900 penduduk (74 dokter)	0.06 1 dokter untuk 600 penduduk (78)			
			Rasio tenaga paramedis puskesmas terhadap penduduk (tiap	0.39	0.39			

			1.000 penduduk)				
			Rasio dokter umum per 100.000 penduduk	46.83	47.89		
			Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk	6.03	6.39		
			Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk	3.07	3.43		
			Rasio tenaga paramedis per 100.000 penduduk (bidan, perawat, tenaga farmasi, tenaga gizi, tenaga kesehatan masyarakat, sanitasi, teknis medis, keterampilan psikiater)	30.03	30.15		

			Persentase persediaan obat di sarana kesehatan pemerintah	100%	100%	2. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan	KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
			Persentase peningkatan pengawasan sarana peredaran obat	100%	100%			
			Persentase peningkatan pengawasan sarana peredaran kosmetik	60%	80%			
Meningkatnya kesehatan ibu dan anak	Peningkatan kesehatan ibu dan anak	Pelayanan kesehatan ibu dan anak	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI	100%	100%	3. Peningkatan keselamatan dan kesehatan ibu melahirkan,	KESEHATAN	DINAS KESEHATAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA MALANG TAHUN 2013 - 2018

						bayi, dan balita		
			Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan	100%	100%			
			Rasio posyandu per satuan balita (1 : 80 balita)	1 : 103	1 : 80		Keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera	DINAS KESEHATAN & BKBPM
			Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	95%	97%			
			Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani	70%	100%			
			Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	80%	91%			

			Cakupan pelayanan Ibu Nifas	89%	91%			
			Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani.	54.89%	80%			
			Cakupan kunjungan bayi.	68.29	90			
			Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI).	47.37%	100%			
			Cakupan pelayanan anak balita.	54.03%	90%			
			Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan setingkat	100%	100%			
			Jumlah kader posyandu	5904	5904			
			Persentase kader posyandu aktif	100% (5904/5904)	100% (5904/5904)			
			Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri	81,75%	81,75%			

Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat	Peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat	1. Pelayanan peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat	Persentase balita gizi buruk	0,45%	0,45%	4. Peningkatan status gizi masyarakat	KESEHA TAN	DINAS KESEHAT AN
			Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100%	100%			
		5. Pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit	100%	100%	KESEHA TAN	DINAS KESEHAT AN	
			Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate per 100.000 penduduk < 15 tahun	98.83%	100%			
			Penemuan Penderita Pneumonia Balita	3.90%	100%			
			Penemuan Pasien Baru TB-BTA positif	15.72%	100%			
			Penderita DBD yang ditangani	100%	100%			

			Penemuan Penderita Diare	6.51	100%			
			Cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	100%			
	2. Peningkatan kesehatan lingkungan;		Cakupan Kelurahan Siaga Aktif	98.25% (56 kelurahan dari 57)	100%	1. Peningkatan promosi kesehatan	KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
			Jumlah LSM di bidang kesehatan masyarakat	0	1	2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)		
	3. Peningkatan dan pemerataan jangkauan layanan kesehatan		Jumlah rujukan penderita HIV AIDS di Puskesmas	0	26	1. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat miskin	KESEHATAN	DINAS KESEHATAN

			Jumlah kerjasama dengan perguruan tinggi kesehatan dalam pelaksanaan bakti sosial kesehatan	0	1			
			Jumlah masyarakat yang terlayani oleh bakti sosial perguruan tinggi	0	110 orang			
			Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin.	100%	100%			
			Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	55.88%	100%	2. Pengembangan jaminan sosial pembiayaan kesehatan	KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
			Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat	55.88%	100%			

			miskin					
			Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kota	100%	100%			
Meningkatnya Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Peningkatan Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Peningkatan kualitas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi peserta KB Aktif sebesar 73,25% (PUS dibagi KB Aktif x 100%)	73.25% (94.250/129.038)	76% 98.069/129.038	3. Pembinaan Kesehatan Keluarga melalui Program Keluarga Berencana	Keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera	BKBP
			Rata-rata jumlah anak per keluarga	2	2			
			Persentase akseptor KB	81%	82%			
			Cakupan peserta KB Aktif	73.25%	76%			
			Persentase peserta KB Aktif	81%	82%			
			Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Kel.	55454	32745			

			Sejahtera I				
			Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya usia di bawah 20 tahun 3,5 % pada 2014	1.02%	0.59%		
			Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi peserta KB Aktif 65 % pada 2014	75.74%			
			Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet Need) 5 % pada 2014	13.24%	8.50%		
			Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB 70 % pada 2014	70.00%	70.80%		

			Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 87% pada 2014	81.93%	87.25%			
			Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) Kelurahan	1:02	1:02			
			Rasio petugas Pembantu Pembina KB Kelurahan (PPKBL) 1 Petugas di setiap Kelurahan	1:01	1:01			

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA MALANG TAHUN 2013 - 2018

			Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun	30%	30%			
			Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Kelurahan 100% setiap tahun	100%	100%			
			Jumlah penyandang penyakit reproduksi remaja					
			Jumlah sosialisasi KIE	33180 kali (5 layanan x 553 RW x 12 bulan)	33186 kali (5 layanan x 553 RW x 12 bulan)			
			Persentase Ketersediaan alat kontrasepsi	100% (16.169/16.169)	100% (66.169/66.169)			
			Jumlah dan jenis layanan KB	6	6			

			Jumlah pria ikut KB	288	325			
			Jumlah Petugas Penyuluh KB Lapangan (PPKBL)					
			Adanya Pengkatagorian Petugas Penyuluh KB Lapangan (PPKBL)	Ada	Ada			
			Jumlah Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama aktif mendukung program KB	1106	1106			

Tabel 7.6

Kebijakan Umum Pembangunan Kota Malang 2013 – 2018

Misi : Membangun Kota Malang sebagai Kota Tujuan Wisata yang Aman, Nyaman, dan Berbudaya

MISI 6 : Membangun Kota Malang sebagai Kota Tujuan Wisata yang Aman, Nyaman, dan Berbudaya								
SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2013	2018			
Meningkatnya kelestarian seni budaya dan kearifan lokal, yang antara lain ditujukan guna meningkatkan daya tarik wisata.	Pengembangan kebudayaan tradisional Malang sebagai kekayaan daerah untuk menunjang sektor pariwisata	1. Revitalisasi khazanah budaya tradisional dan tempat dengan nilai sejarah tinggi	Adanya hasil pemetaan tentang khazanah seni budaya khas Kota Malang	30%	55%	1. Inventarisasi aset budaya tradisional Kota Malang, terutama yang dapat dikembangkan sebagai potensi wisata	KEBUDAYAAN	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA MALANG TAHUN 2013 - 2018

			Jumlah kelompok kebudayaan yang masih aktif	12	17	2. Inventarisasi dan pembinaan kelompok-kelompok budaya di Kota Malang	KEBUDA YAAN	DINAS KEBUDAY AAN DAN PARIWISA TA
			Jumlah pembinaan terhadap kelompok-kelompok kebudayaan	224	349			
			Jumlah penghargaan yang diterima oleh budayawan/seni man, baik di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional	4	9	3. Peningkatan dukungan dan apresiasi terhadap aktivitas kebudayaan oleh budayawan/s eniman dan masyarakat	KEBUDA YAAN	DINAS KEBUDAY AAN DAN PARIWISA TA

		2. Peningkatan promosi terhadap khazanah budaya yang dimiliki Kota Malang	Jumlah event pariwisata/buda ya yang diadakan oleh budayawan dan masyarakat	1	6	1. Fasilitasi dan intensifikasi promosi wisata berbasis seni budaya	PARIWIS ATA	DINAS KEBUDAY AAN DAN PARIWISA TA
		Jumlah media promosi wisata budaya Kota Malang	5 KORAN LOKAL 10 TV LOKAL	10 KORAN LOKAL 15 TV LOKAL				
		Jumlah keikutsertaan budayawan dalam event- event wisata	3	8				
		Jumlah event promosi wisata budaya	6	11				
		Jumlah kerjasama dengan pihak lain untuk mempromosikan pariwisata kebudayaan kota Malang	3	8				

			Jumlah penggunaan Gedung Kesenian untuk kegiatan seni budaya	20	25			
			Cakupan kajian seni 50% pada 2014	50%	100%			
			Cakupan fasilitasi seni	143	143			
			Cakupan gelar seni	133	133			
			Cakupan misi kesenian	100	100			
			Cakupan SDM kesenian	250	250			
			Cakupan tempat kesenian	100	100			
			Cakupan organisasi kesenian	196	196			
Meningkatnya ragam dan kualitas obyek wisata alam dan buatan	Pengembangan destinasi wisata, baik destinasi lama maupun baru	1. Peningkatan promosi destinasi wisata Kota Malang	Rata-rata persentase tingkat okupansi hotel	49%	62.5%	1. Pengembangan Destinasi Pariwisata	PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA MALANG TAHUN 2013 - 2018

			Jumlah restoran/ rumah makan	191	216			
			Jumlah Objek cagar budaya	212	222			
			Persentase objek Cagar Budaya yang terawat	40%	62%			
			Persentase penanganan terhadap pelanggaran Konservasi Cagar Budaya	100%	100%			
			Jumlah obyek wisata aset daerah yang direvitalisasi	1	0			
			Jumlah penyedia jasa transportasi wisata	113	143			
			Adanya Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPPDA)	1	1			

			Jumlah pusat informasi wisata	4	9			
			Jumlah media promosi wisata	8	8			
			Adanya kalender wisata kreatif berbasis kegiatan masyarakat	10	45			
			Persentase Jumlah taman kota dan hutan kota sebagai lokasi rekreasi murah masyarakat	11	16			
			Rasio lokasi rekreasi murah per 100.000 penduduk	0.3	0.8			
			Jumlah kerjasama dengan pihak lain untuk merevitalisasi taman dan hutan kota menjadi lokasi rekreasi murah	1	5			

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA MALANG TAHUN 2013 - 2018

			Jumlah kerjasama dengan pihak lain untuk mempromosikan lokasi wisata murah masyarakat	0	5			
			Jumlah kegiatan masyarakat yang menunjang pariwisata	10	35			
			Jumlah kelompok/ komunitas sadar wisata	0	15			

Tabel 7.7

Kebijakan Umum Pembangunan Kota Malang 2013 – 2018

Misi : Mendorong Pelaku Ekonomi Sektor Informal dan UKM agar Lebih Produktif dan Kompetitif

MISI 7 : Mendorong Pelaku Ekonomi Sektor Informal dan UKM agar Lebih Produktif dan Kompetitif								
SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2013	2018			
Meningkatnya produktivitas dan daya saing pelaku usaha kecil menengah	Peningkatan peran pemerintah dalam perlindungan dan pembinaan UKM	1. Peningkatan nilai produktivitas UKM dari segi volume (omset) dan nilai uang	Jumlah kebijakan daerah yang melindungi perkembangan UKM	0	4	1. Pembuatan kebijakan daerah yang mendorong tumbuh kembangnya UKM	KOPERASI DAN UKM	DINAS KOPERASI DAN UKM
			Jumlah UKM	10,611	73,691			
			Jumlah asosiasi pengusaha UKM	1	5			
			Persentase wirausaha baru yang aktif	210	1,948			

			Adanya database dan profil UKM di Kota Malang	1	5			
			Jumlah perizinan usaha UKM	548	3,388			
			Jumlah kerjasama UKM dengan pasar modern	0	18			
			Persentase penyerapan produk unggulan UKM di pasar modern (minimarket dan supermarket)	0	75%			
			Jumlah tenaga kerja UKM	43,234	232,622			
			Jumlah promosi pameran daerah yang diikuti UKM per tahun	6	75			
			jumlah pusat konsultasi bisnis	1	5			

			Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara UKM tingkat kota dengan pengusaha tingkat provinsi	0	5			
Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin melalui UMKM	1. Peningkatan upaya pelatihan ketrampilan untuk pemberdayaan masyarakat miskin	Cakupan masyarakat/ kelompok masyarakat miskin yang mendapat pelatihan ketrampilan	1.09%	2,01 %	2. Pembinaan kapasitas kelembagaan UKM	KOPERA SI DAN UKM	DINAS KOPERAS I DAN UKM	
		Cakupan masyarakat/ kelompok masyarakat miskin yang mendapat bantuan sarana dan prasarana usaha	0.54%	1.03%				

			Cakupan masyarakat/kelompok masyarakat miskin yang terfasilitasi dalam memperoleh modal usaha	34.99%	44.14%			
			Jumlah perputaran modal UKM	30 milyar	165 milyar	3. Pembinaan manajemen keuangan UKM	KOPERASI DAN UKM	DINAS KOPERASI DAN UKM
			Jumlah Nilai transaksi dalam tiap promosi UKM	15 jt	150 jt			
			Jumlah pelatihan manajemen keuangan bagi pelaku UKM	5	100			
			Cakupan pelaku UKM yang mengikuti pelatihan manajemen keuangan	1%	35%			

			Jumlah Besar kredit yang disalurkan pada sektor UKM	316 milyar	2.195 milyar			
			Persentase Tingkat pengembalian kredit UKM	80%	100%			
			Jumlah kelompok pelaku ekonomi produktif	149	149			
			Jumlah kegiatan pelatihan keterampilan kepada pelaku ekonomi produktif	1	34			
			Jumlah pelaku ekonomi produktif penerima akses permodalan	75	250			
Meningkatnya produktivitas dan daya saing pelaku usaha mikro	Peningkatan peran pemerintah dalam perlindungan dan	1. Penataan disertai pemberdayaan terhadap PKL	Adanya hasil pemetaan mengenai jumlah dan titik sebaran PKL sebelum	0	Ada	1. Inventarisasi jumlah dan sebaran PKL serta Peningkatan	PERDAG ANGAN	DINAS PASAR

	pembinaan pelaku usaha mikro		dilakukan penertiban			bantuan kredit permodalan melalui fasilitasi hubungan dengan kalangan perbankan				
			Jumlah PKL yang mendapatkan KUR	0	250					
			Jumlah Besar kredit yang dikucurkan oleh kalangan perbankan kepada PKL	0	0					
			Persentase Tingkat pengembalian kredit PKL	0	0					
			Jumlah kawasan khusus PKL	1	5	2. Pembangunan sentra-sentra PKL yang layak, yang terintegrasi dengan			PERDAGANGAN	DINAS PASAR

						kawasan pengembangan kota		
	Revitalisasi pasar tradisional	1. Penataan dan Perlindungan pasar tradisional	Adanya kebijakan daerah yang melindungi keberadaan pasar tradisional	1	2	1. Pengembangan kerjasama dengan berbagai pihak untuk memberdayakan pedagang pasar tradisional	PERDAGANGAN	DINAS PASAR, DINAS PERINDUSTRI-AN DAN PERDAGANGAN & BAGIAN KERJASAMA DAN PENANAMAN MODAL - SETDA
			Cakupan pedagang tradisional yang menerima manfaat dari program pemberdayaan	6000	6500			

			Jumlah kerjasama dengan pihak lain dalam kegiatan pemberdayaan pedagang pasar tradisional	3	3			
			Jumlah infrastruktur pasar tradisional yang direhabilitasi melalui kerjasama dengan pihak lain	3	3			
			Jumlah pasar tradisional	28	28	3. Penataan pasar tradisional kecamatan	PERDAGANGAN	DINAS PASAR & DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Jumlah paguyuban pedagang pasar tradisional	28	28			

			Persentase infrastruktur bangunan pasar tradisional yang direhabilitasi	32% (9/28)	100% (28/28)			
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Koperasi di Kota Malang	Peningkatan fungsi koperasi dalam menunjang keberlangsungan UMKM	1. Penguatan koperasi dalam ekonomi daerah	Persentase KSP / USP sehat	265/1.684	100% (1.684/1.684)	1. Pembinaan pengelolaan dan keuangan koperasi	KOPERASI DAN UKM	DINAS KOPERASI DAN UKM
			Persentase koperasi berkategori sehat / baik / yang sudah menerapkan sistem pencatatan sesuai Standart Akuntansi Indonesia	134/928	100% (928/928)			
			Jumlah koperasi berprestasi	2	10			

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA MALANG TAHUN 2013 - 2018

		2. Pengawasan dan pengendalian terhadap jenis usaha koperasi	Persentase permasalahan perkoperasian yang tertangani	60%	100%			
Meningkatnya daya saing produk pangan daerah	Pengembangan produk yang berbasis potensi sumber daya lokal	1. Peningkatan pengelolaan produk lokal untuk dijadikan unggulan daerah	Jumlah Nilai produksi hasil pertanian	16243	18377	1. Peningkatan produksi potensi unggulan daerah di bidang pertanian/ perkebunan, peternakan, dan perindustrian	PERTANI AN	DINAS PERTANIA N
			Jumlah Nilai produksi hasil perkebunan	113449	128357			
			Jumlah Nilai produksi hasil peternakan	759952	859817			
			Jumlah nilai produksi hasil perikanan	40519	45843		KELAUT AN DAN PERIKAN AN	DINAS PERTANIA N

Meningkatnya produk pangan lokal sebagai pendukung ketahanan pangan daerah	Peningkatan ketahanan pangan daerah	1. Peningkatan ketersediaan, pemanfaatan, pengolahan, dan distribusi produk pangan daerah guna ketahanan pangan	Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita 90% pada 2015	57,44%	100%	Peningkatan ketersediaan dan cadangan pangan daerah	KETAHANAN PANGAN	KANTOR KETAHANAN PANGAN
			Penguatan Cadangan Pangan 60% pada 2015	50%	80%			
			Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	60%	100%			
			Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah	60%	95%			
			Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	60%	90%	Peningkatan penganekaragaman produksi pangan	KETAHANAN PANGAN	KANTOR KETAHANAN PANGAN
			Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	50%	85%	Peningkatan distribusi bahan pangan	KETAHANAN PANGAN	KANTOR KETAHANAN PANGAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA MALANG TAHUN 2013 - 2018

			Penanganan Daerah Rawan Pangan	50%	75%			
--	--	--	--------------------------------------	-----	-----	--	--	--

Tabel 7.8
Kebijakan Umum Pembangunan Kota Malang 2013 – 2018

Misi : Mendorong Produktivitas Industri dan Ekonomi Skala Besar yang Berdaya Saing, Etis dan Berwawasan Lingkungan

MISI 8 : Mendorong Produktivitas Industri dan Ekonomi Skala Besar yang Berdaya Saing, Etis dan Berwawasan Lingkungan								
SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2013	-2018			
Meningkatnya nilai investasi untuk pengembangan industri berskala besar	Peningkatan dan optimalisasi investasi skala besar	Penciptaan peluang investasi skala besar di berbagai sektor terutama pangan, energi, pariwisata dan infrastruktur	1. Adanya kebijakan daerah yang mendukung masuknya investasi baru	Ada	Ada	1. Peningkatan kebijakan daerah yang mendukung investasi	PENANAMAN MODAL	BAGIAN KERJASAMA DAN PENANAMAN MODAL - SETDA
			2. Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	0	5			

			3. Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	Ada	Ada			
			4. Terselenggaranya fasilitasi Pemerintah Daerah dalam rangka kerjasama kemitraan	6 MOU				
			5. Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal	9 kegiatan	9 kegiatan			
			6. Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	0	4			
			7. Jumlah investor baru skala nasional	9	14			

							PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Meningkatnya penyerapan tenaga kerja industri	Peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga kerja industri	Mengembangkan kualitas hubungan industrial industrial	1. Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	0%	75%	2. Peningkatan kualitas tenaga kerja	KETENAGAKERJAAN	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
			2. Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	71%	80%			
			3. Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	0%	60%			
			4. Jumlah Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja	341 orang	549 orang	3. Peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	KETENAGAKERJAAN	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

			5. Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	28%	70%		KETRAN SMIGRA-SIAN	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
			6. Jumlah lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal	1.035 perusahaan	1.050 perusahaan			
			7. Angka partisipasi angkatan kerja	12.79%	40%			
			8. Jumlah pengangguran terbuka	7,145	6591			
			9. Rasio daya serap tenaga kerja	64.81	0.75			
			10. Jumlah Pelayanan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	48.385 orang	58.812 orang			
			11. Jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	48.385 orang	88630 orang			

			12. Upah Minimum Kota (UMK)	18%	25%			
			13. Jumlah pelayanan yang menerapkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	707	1350			
			14. Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	77%	85%	3. Peningkatan fasilitas konflik hubungan industrial	KETENAGAKERJAAN	DINAS KETENAGAKERJAN DAN TRANSMISIGRASI
			15. Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	65%	90%			
			16. Jumlah kasus Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	35 kasus	25 kasus			

			17. Persentase Pemeriksaan Perusahaan	68%	85%			
			18. Persentase Pengujian Peralatan di Perusahaan	27%	50%			
Terintegrasinya sentra industri kecil menengah	Pengelolaan industri kecil menengah menuju penataan kawasan terpadu	Peningkatan produktivitas industri kecil menengah berbasis kawasan	1. Jumlah kerjasama alih TTG dengan perguruan tinggi	40 kerja sama		4. Optimalisasi alih Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam pengolahan produk unggulan	INDUS-TRI	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			2. Jumlah IKM penerima alih TTG	120				
			3. Cakupan IKM penerima hibah sarana produksi	10%				
			5. Persentase kerjasama produksi antar IKM yang telah dibina	60%		5. Pengembangan kawasan industri kecil menengah terpadu	INDUS-TRI	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

			6. Persentase IKM yang mengembangkan kerjasama produksi	100%				
--	--	--	---	------	--	--	--	--

Tabel 7.9
Kebijakan Umum Pembangunan Kota Malang 2013 – 2018

Misi : Mengembangkan Sistem Transportasi Terpadu dan Infrastruktur Yang Nyaman Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat

MISI 9 : Mengembangkan Sistem Transportasi Terpadu dan Infrastruktur Yang Nyaman Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat								
SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2013	-2018			
Meningkatnya fungsi sarana transportasi	Peningkatan akses transportasi	Penyelesaian persoalan kota di bidang transportasi	1. Jumlah titik rawan macet	33	1	6. Penanganan persoalan kemacetan di berbagai ruas jalan	PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
			2. Persentase titik rawan macet yang berhasil diurai	15,15%	24%			

			3. Persentase ketersediaan SDM di bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRL), Evaluasi Andal Lalin, Pengelolaan Parkir	100%	100%			
			4. Persentase ketersediaan SDM yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum	100%	100%			
			5. Adanya tempat pengujian kendaraan bermotor	Ada		7. Peningkatan pengendalian pemanfaatan sarana transportasi dan perhubungan	PERHUB UNGAN	DINAS PERHUB UNGAN

			6. Cakupan kendaraan wajib uji kir yang terlayani	73.79%			
			7. Persentase tersedianya Unit Pengujian Kendaraan Bermotor per 4.000 kendaraan wajib uji	100%	100%		
			8. Rasio infrastruktur perlengkapan jalan	0.49	0.85		
			9. Persentase tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill)	49.28%	85%		
			10. Jumlah titik parkir di tepi jalan umum	412	512		
			11. Jumlah penertiban parkir di tepi jalan umum	412	512		

			12. Persentase halte dalam kondisi baik	100%	100%			
			13. Persentase ketersediaan halte yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	86.11%	100%			
			14. Persentase ketersediaan terminal yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	100%	100%			
			15. Jumlah penertiban terminal bayangan	11	55			
			16. Persentase Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kota	94.96%	100%			

			17. Jumlah penertiban angkutan umum tanpa ijin trayek	48	160	8. Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan dan pelaksana sistem transportasi dan memperkuat koordinasi antar sektor dan pihak terkait	PERHUB UNGAN	DINAS PERHUB UNGAN
			18. Persentase ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan 75% untuk 2014	62.36%	100%			
			19. Jumlah izin trayek angkutan	1808 izin	1808 izin			
			20. Jumlah organisasi/ paguyuban angkutan darat	2	2			

			21. Jumlah rekomendasi Forum Lalu Lintas untuk penyelesaian persoalan lalu lintas	6 Rekom	34 Rekom			
Meningkatnya daya dukung sistem transportasi dan sarana perhubungan untuk menunjang mobilitas masyarakat	Pengembangan sistem transportasi terpadu	1. Peningkatan penerapan sistem manajemen transportasi sesuai standar layanan publik	1. Jumlah peralatan perawatan jalan yang cukup	1	4	1. Peningkatan pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan sarana bina marga	PEKERJAAN UMUM	DINAS PU - PPB
			2. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0.27	1.5			DINAS PU - PPB, DKP
			3. Persentase kondisi jalan yang baik	90.59%	100%			
			4. Persentase jembatan standar (lebar minimal 6 meter) yang dilalui	48%	55%			

			kendaraan Roda 4					
			5. Jumlah pembangunan jalan dan jembatan baru					
			- jalan	0	1			
			- jembatan	1	2			
			6. Jumlah pembangunan pedestrian yang ramah terhadap pejalan kaki dan penyandang cacat	9	23			
Meningkatnya kualitas dan kuantitas ketersediaan infrastruktur pemukiman dan drainase	Peningkatan pembangunan sarana pemukiman dan drainase	2. Peningkatan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah-wilayah yang menjadi kantong kemiskinan	1. Adanya peta wilayah kawasan kumuh	Belum ada	ada	2. Penyediaan infrastruktur dasar di wilayah miskin	PERUMAHAN	DINAS PU - PPB, KELURAHAN
		3. Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan sarana pemukiman dan	2. Persentase penurunan kawasan kumuh	15%	6%	3. Peningkatan ketersediaan infrastruktur pemukiman rakyat yang layak	PERUMAHAN	DINAS PU - PPB, DKP

		drainase perkotaan						
			3. Persentase wilayah kawasan kumuh yang tidak terjangkau sarana air bersih	16%	11%		PERUMA HAN	DINAS PU - PPB
			4. Jumlah wilayah kawasan kumuh yang tidak bersanitasi	16%	11%			
			5. Rata-rata prosentase rumah tinggal bersanitasi di wilayah kumuh	84%	89%			
			6. Prosentase rumah layak huni di wilayah kumuh	84%	89%			
			7. Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih di wilayah kumuh	84%	89%		PERUMA HAN	DINAS PU - PPB, DINAS KEBERSI HAN DAN PERTAMA NAN

			8. Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	200	1329			
			9. Jumlah Rumah tangga pengguna air bersih	116,857	188,199			
			10. Jumlah Rumah tangga pengguna listrik	278,471	292,676			
			11. Jumlah Rumah tangga ber-Sanitasi sehat	85%	89%			
			12. Prosentase rumah layak huni	84%	88%		PERUMAHAN	DINAS PU - PPB
			13. Cakupan ketersediaan rumah layak huni	200 Unit	300 unit			
			14. Cakupan rumah layak huni yang terjangkau	96%	100%			

			15. Cakupan gedung daerah/Fasilitas Umum/Fasilitas Sosial yang memenuhi standar	60%	85%			
			16. Prosentase rumah tinggal (RT) layak huni yang menggunakan air bersih	16%	20%			
			17. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kota 25% pada 2015	80%	84%		PERUMAHAN	DINAS PU - PPB
			18. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	75%	75%			

			19. Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran Diatas 3000-5000 Liter Pada WMK	85%	90%			
			20. Luasan PSU yang dibangun pihak ke-tiga	10%	0.15			
			21. Rasio Luasan PSU yang diserahkan ke pemkot dibanding luasan PSU yang ada	10%	0.15			
			22. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas umum (PSU)	90%	95%			
			23. Panjang drainase baru yang dibangun	19.9 km	100 km	4. Peningkatan ketersediaan infrastruktur drainase	PEKERJ AAN UMUM	DINAS PU - PPB

			24. Persentase pemeliharaan drainase	2.51%	25%			
			25. Jumlah ketersediaan sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota, sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	3 Jaringan				
Penetapan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan TPU secara profesional	Optimalisasi lahan TPU	26. Jumlah Tempat Pemakaman Umum	9 TPU	11	Pengelolaan TPU	PERUMAHAN	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	
		27. Luas lahan Tempat Pemakaman Umum	447,396 m ²	466.596 m ²				
		28. Rasio luas lahan Tempat Pemakaman Umum/1.000 org.	529,04 m ² /1.000 orang	365,25 m ² /1.000 orang				